**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

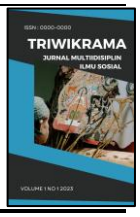


# DAMPAK PROGRAM DANA DESA TERHADAP PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN DI INDONESIA

**Sari Nur Maharanti, Hendi Irawan S.Pd, M.Kesos.**

Universitas Indraprasta PGRI

**ARTICLE INFO**

**Article history:**
Received Juli 2026
Revised Juli 2026
Accepted Juli 2026
Available Juli 2026

maharantisarinur@gmail.com

*This is an open access article under the CC BY-SA license.*
*Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

**Abstrak**

Program Dana Desa merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan mempercepat pembangunan pedesaan melalui peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Dana Desa terhadap perubahan struktur sosial masyarakat pedesaan di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori modernisasi dan teori ketergantungan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan laporan penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi perubahan sosial yang terjadi sebagai dampak implementasi Program Dana Desa. Hasil kajian menunjukkan bahwa Program Dana Desa memberikan dampak positif berupa peningkatan infrastruktur, akses pelayanan publik, mobilitas sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat desa. Di sisi lain, program ini juga memunculkan berbagai tantangan, seperti meningkatnya kesenjangan sosial, berkurangnya budaya gotong royong, munculnya dominasi elite desa, serta ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Perspektif teori modernisasi memandang pembangunan desa sebagai proses menuju masyarakat yang lebih maju dan produktif, sedangkan teori ketergantungan menekankan adanya potensi ketimpangan dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan desa perlu dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan berkeadilan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan sosial yang baru.

Kata Kunci: Dana Desa, pembangunan desa, perubahan struktur sosial, teori modernisasi, teori ketergantungan, sosiologi pembangunan.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

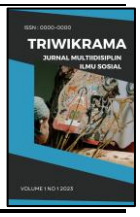


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mellui kebijakan ekonomi, sosial, dan politik. Di Indonesia, pembangunan tidak hanya difokuskan pada wilayah perkotaan, tetapi juga diarahkan pada pembangunan pedesaan sebagai bentuk pemerataan pembangunan nasional. Desa menjadi perhatian penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih tinggal di wilayah pedesaan dan bergantung pada sektor agraris.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa adalah Program Dana Desa yang mulai diterapkan setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Program ini memberikan alokasi dana kepada desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayan publik. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap desa mampu berkembang lebih mandiri dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

Program Dana Desa menjadi salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan pedesaan di Indonesia. Sejak diberlakukan pada tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan dana desa dalam jumlah yang sangat besar untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di desa. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, alokasi dana desa setiap tahunnya terus meningkat sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antara desa dan kota. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa desa menjadi fokus penting dalam agenda pembangunan nasional karena dianggap memiliki peran besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Program dana desa memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat pedesaan. Pembangunan jalan desa, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan mulai berkemban di berbagai wilayah desa. Selain meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, pembangunan juga membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Namun, pembangunan desa tidak selalu memberikan dampak positif secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, pembangunan justru memunculkan persoalan sosial

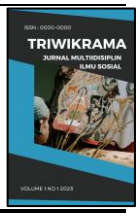


baru seperti meningkatnya kesenjangan sosial, lemahnya partisipasi masyarakat, munculnya konflik kepentingan dalam pengelolaan dana desa, serta berkurangnya budaya gotong royong di masyarakat pedesaan. Selain itu, adanya kelompok elite desa yang memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan pembangunan sering kali menyebabkan distribusi manfaat pembangunan menjadi tidak merata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya membawa perubahan ekonomi, tetapi juga memengaruhi struktur sosial masyarakat desa secara kompleks.Dalam perspektif teori modernisasi, pembangunan dipandang sebagai proses perubahan menuju masyarakat yang lebih maju dan modern melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan dan teknologi. Sementara itu, teori ketergantungan mengkritisi pembangunan yang dianggap dapat menciptakan ketimpangan sosial dan dominasi kelompok tertentu terhadap masyarakat kecil.

Fenomena tersebut menunjukan bahwa pembangunan tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga membawa perubahan sosial yang cukup kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai dampak program dana desa terhadap struktur sosial masyarakat pedesaan penting untuk dianalisis dalam perspektif sosiologi pembangunan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak program dana desa terhadap perubahan struktur sosial masyarakat pedesaan di Indonesia ?
2. Bagaimana teori modernisasi menjelaskan pembangunan desa melalui program dana desa ?
3. Bagaimana teori ketergantungan mengkritisi dampak pembangunan desa terhadap masyarakat pedesaan ?

## C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan dampak program dana desa terhadap perubahan struktur sosial masyarakat pedesaan di Indonesia
2. Menganalisis pembangunan desa melalui perspektif teori modernisasi
3. Menganalisis kritik teori ketergantungan terhadap pembangunan desa di Indonesia

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

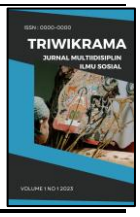


## D. Manfaat Penulisan

Penulisan paper ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis maupun praktis. Secara akademis, paper ini dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara pembangunan dan perubahan sosial dalam kajian sosiolohi pembangunan. Secara praktis, paper ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan desa agar lebih memperhatikan kondisi sosial masyarakat.

# TINJAUAN PUSTAKA / KERANGKA TEORITIS

## A. Teori Modernisasi

Teori modernasasi merupakan salah satu teori pembangunan yang menjelaskan bahwa masyarakat akan mengalami perkembangan secara bertahap menuju kondisi yang lebih modern. Teori ini berkembang setalah Perang Dunia II dan banyak digunakan dalam proses pembangunan negara berkembang. Modernisasi menekankan pentingnya industrialisasi, pembangunan infrastruktur, pendidik, serta pembangunan teknolog untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial.

Menurut Walt Whitman Rostow, pembangunan masyarakat berlangsung melalui beberapa tahapan, mulai dari masyarakat tradisional hingga masyarakat modern yang memiliki tingkat konsumsi tinggi. Dalam teori ini, negara berkembang dianggap dapat mencapai kemajuan apabila mengikuti pola pembangunan negara maju. Oleh karena itu, pembangunan dipandang sebagai proses perubahan menuju masyarakat yang lebih rasional, produktif, dan modern.

Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia, program dana desa dapat dipahami sebagai bagian dari proses modernisasi masyarakat pedesaan. Melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan fasilitas publik, masyarakat desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas pendidikan menjadi contoh nyata modernisasi di wilayah pedesaan.

Teori modernisasi juga menjelaskan bahwa pembangunan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Masyarakat desa yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses transportasi dan informasi menjadi lebih mudah melakukan aktivitas ekonomi setelah adanya pembangunan infrastruktur desa.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

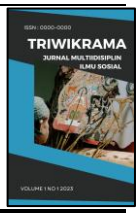


## B. Teori Ketergantungan

Teori ketergantungan muncul sebagai kritik terhadap teori modernisasai. Teori ini berkembang di negara Amerika Latin pada tahun 1960. Tokoh seperti Andre Gunder Frank dan Fernando Henrique Cardoso menjelaskan bahwa keterbelakangan negara berkembang bukan disebabkan oleh kurangnya modernisasi, tetapi karena adanya hubungan ketergantungan dengan negara atau kelompok yang lebih kuat.

Dalam perspektif teori ketergantungan, pembangunan sering kali hanya menguntungkan kelompok tertentuk dan memperbesar kesenjangan sosial. Pembangunan yang dilakukan pemerintah dapat menciptakan dominasi elite terhadap masyarakat kecil, terutama ketika distribusi sumber daya tidak dilakukan secara merata.

Dalam program dana desa, teori ketergantungan dapat digunakan untuk melihat bagaimana pembangunan desa berpotensi menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Selain itu, pengelolaan dana desa yang tidak transparan juga dapat memunculkan kelompok elite desa yang memiliki kekuasaan lebih bessar dibanding masyarakat desa.

Teori ketergantungan juga menjelaskan bahwa pembangunan tidak selalu menghasilkan kesejahteraan sosial secara merata. Sebagian masyarakat mungkin memperoleh manfaat yang besar dari pembangunan, sementara kelompok lainnya justru mengalami marginalisasi akibat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi.

## C. Konsep Perubahan Sosial

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam pola kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan sosial, nilai, norma, maupun struktur sosial. Perubahan sosial dapat terjadi karena berbagai faktor salah satunya adalah pembangunan. Ketika pembangunan berlangsung secara cepat, masyarakat akan mengalami perubahan dalam pola pikir, gaya hidup, serta hubungan sosial antar masyarakat.

Dalam masyarakat pedesaan, perubahan sosial dapat terlihat dari perubahan pola kerja masyarakat, meningkatnya mobilitas sosial, perubahan pola interaksi sosial, serta berkurangnya budaya gotong royong. Pembangunan juga dapat mempengaruhi pembagian kekuasaan dalam masyarakat desa, terutama ketika muncul kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya pembangunan.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

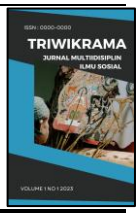


## D. Sintesis Teori

Teori modernisasi dan teori ketergantungan memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembangunan. Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai proses perubahan menuju masyarakat yang lebih maju melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, teori ketergantungan mengkritisi pembangunan yang dianggap dapat menimbulkan ketimpangan sosial, dominasi elite, dan ketergantungan masyarakat terhadap pihak yang memiliki kekuasaan lebih besar.

Dalam konteks program dana desa, teori modernisasi menjelaskan bahwa pembangunan desa mampu meningkatkan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, teori ketergantungan menunjukan bahwa pembangunan juga dapat memunculkan kesenjangan sosial dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat desa. Oleh karena itu, kedua teori ini digunakan untuk memberikan analisis yang lebih kritis dan seimbang terhadap dampak pembangunan desa.

## METODOLOGI PENULISAN

Penelitian dalam paper ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber data sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta laporan penelitian yang berkaitan dengan pembangunan desa dan perubahan sosial masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan membaca dan menganalisis berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis untuk memahami hubungan anatara program dana desa dan perubahan struktur sosial masyarakat pedesaan.

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modernisasi dan teori ketergantungan. Kedua teori ini digunakan untuk membandingkan pandangan mengenai dampak pembangunan terhadap masyarakat pedesaan di Indonesia.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

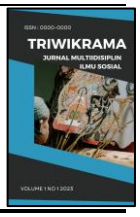


## PEMBAHASAN

### A. Program Dana Desa Sebagai Kebijakan Pembangunan

Program dana desa merupakan salah satu kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemerataan pembangunan. Kebijakan ini lahir setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang memberikan kewenangan lebihbesar kepada desa dalam mengelola pembangunan dan keuangan desa. Pemerintah berharap melalui kebijakan tersebut desa mampu berkembang secara mandiri dan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotan dan pedesaan.

Dana desa digunakan untuk berbagai program pembangunan seperti pembangunan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, fasilitas kesehatan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha ekonomi desa. Program ini menunjukan adanya peran aktif negara dalam proses pembangunan masyarakat. Negara tidak hanya bertindak sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pihak yang menentukan arah pembangunan melalui distribusi anggaran pembangunan.

Dalam pelaksanaannya, progrm dana desa membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Desa yang sebelumnya mengalami keterbatasan fasilitas publik mulai mengalami perkembangan infrastruktur yang cukup signifikan. Pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan dan transportasi.

### B. Analisis Program Dana Desa Dalam Perspektif Teori Modernisasi

Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai proses perubahan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Modernisasi menekankan bahwa pembangunan ekonomi, pendidikan, teknologi, dan infrastruktur merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam perspektif ini, program dana desa dianggap sebagai modernisasi pedesaan yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur desa melalui dana desa menunjukan adanya proses modernisasi dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Jalan desa yang lebih baik mempermudah distribusi hasil pertanian dan memperluas akses masyarakat terhadap pasar. Selain itu, pembangunan fasilitas pendidikan dan teknologi informasi membuat masyarakat desa mulai mengalami perubahan pola pikir yang lebih modern.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

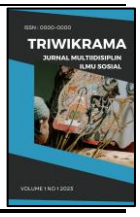


Teori modernisasi juga menjelaskan bahwa pembangunan mampu meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Masyarakat desa yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses ekonomi kini memliki peluang untuk meningkatkan taraf hidup melalui berbagai kegiatan usaha dan ekonomi produktif. Pembangunan desa dianggap mampu mendorong masyarakat menjadi rasional, produktif, fan terbuka terhadap perubahan.

Dalam perspektif modernisasi, peran negara sangat penting sebagai penggerak pembangunan. Negara dianggap memiliki tanggung jawab untuk menyediakan faisilitas pembangunan dan menciptakan kondisi yang mendukung kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dana desa dipandang sebagai langkah positif pemerintah dalam mempercepat transformasi sosial masyarakat pedesaan menuju masyarakat yang lebih maju.

Namun, teori modernisasi cenderung lebih menekankan keberhasilan pembangunan dari sisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Akibatnya, teori ini sering dianggap kurang memperhatikan dampak sosial pembangunan seperti munculnya kesenjangan sosial dan perubahan hubungan sosial masyarakat desa.

## C. Analisis Program Dana Desa Dalam Perspektif Teori Ketergantungan

Berbeda dengan teori modernisasi, teori ketergantungan melihat pembangunan sebagai proses yang dapat menciptakan ketimpangan sosial dan dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya. Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan tidak selalu menghasilkan kesejahteraan yang merata karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang dalam proses pembangunan.

Dalam konteks program dana desa, teori ketergantungan dapat digunakan untuk melihat bagaimana pembangunan desa berpotensi menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah. Masyarakat desa menjadi terlalu bergantung pada dana bantuan negara sehingga kemandirian ekonomi masyarakat belum berkembang secara maksimal.

Selain itu, teori ketergantungan juga menjelaskan adanya relasi kekuasaan dalam pengelolaan dana desa. Dalam beberapa kasus, kelompok elite desa seperti kepala desa, perangkat desa, atau kelompok tertentu memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan desa. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat biasa sering kali hanya menjadi pihak yang menerima keputusan pembangunan tanpa memiliki kekuasaan yang cukup dalam proses pengambilan keputusan.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

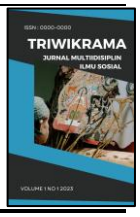


Relasi kekuasaan tersebut menunjukan bahwa pembangunan tidak selalu berjalan secara demikratis dan partisipatif. Kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan infromasi cenderung memperoleh keuntungan lebih besar dibanding masyarakat biasa. Akibatnya, pembangunan dapat memunculkan kesenjangan sosial baru di masyarakata pedesaan.

Teori ketergantungan juga mengkritisi pembangunan yang terlalu berorientasi pada pembangunan fisik. Pembangunan jalan, gedung, dan fasilitas umum memang meningkatkan infrastruktur desa, tetapi tidak selalu mampu memperkuat kondisi sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, pembangunan justru menyebabkan melemahnya budaya gotong royong dan solidaritas sosial masyarakat desa.

Dalam beberapa kasus di Indonesia, pengelolaan dana desa juga menimbulkan permasalahan penyalahgunaan anggaran dan kurangnya transparansi pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa masih dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara elite desa dan masyarakat. Masyarakat sering kali hanya menjadi penerima kebijakan tanpa memiliki ruang partisipasi yang kuat dalam proses perencanaan pembangunan. Akibatnya, pembangunan yang seharusnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru berpotensi memperkuat dominasi kelompok tertentu dalam struktur sosial masyarakat desa.

## D. Perbandingan Toeri Modernisasi dan Teori Ketergantungan

Teori modernisasi dan teori ketergantungan memiliki pandangan yang berbeda mengenai pembangunan desa. Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai proses kemajuan yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Sementara itu, teori ketergantungan melihat pembangunan sebagai proses yang dapat menciptakan ketimpangan dan dominasi kelompok tertentu.

Dalam program dana desa, teori modernisasi mampu menjelaskan keberhasilan pembangunan desa dalam meningkatkan infrastruktur dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pembangunan jalan desa, fasilitas kesehatan, serta sarana pendidikan menunjukan adanya perubahan menuju masyarakat yang lebih modern dan berkembang.

Namun, teori ketergantungan memberikan kritik terhadap dampak sosial pembangunan yang tidak merata. Program dana desa dinilai berpotensi menciptakan

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

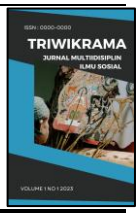


ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah serta memperkuat kekuasaan elite desa dalam pengelolaan pembangunan.

Perbandingan kedua teori tersebut menunjukan bahwa pembangunan memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi di sisi lain pembangunan juga dapat menimbulkan perubahan sosial yang kompleks seperti kesenjangan sosial, konflik kepentingan, dan perubahan hubungan sosial masyarakat.

Perbedaan kedua teori tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapat dipahami hanya sebagai keberhasilan pembangunan fisik semata. Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari kemampuan negara dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat agar perubahan sosial yang terjadi tidak menimbulkan ketimpangan baru.

## E. Dampak Sosial Pembangunan Terhadap Struktur Sosial Masyarakat

Program dana desa membawa dampak sosial yang cukup besar terhadap struktur sosial masyarakat pedesaan. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah perubahan pola hubungan sosial masyarakat. Masyarakat desa yang sebelumnya memiliki hubungan sosial yang erat dan kuat mulai mengalami perubahan akibat meningkatnya orientasi ekonomi dalam kehidupan sehari – hari.

Budaya gotong royong yang dahulu menjadi ciri khas masyarakat pedesaan mulai mengalami penurunan. Sebagian masyarakat lebih memilih hubungan kerja yang bersifat upahan dibandingkan kerja sukarela atau gotong royong. Kondisi tersebut menunjukan bahwa pembangunan tidak hanya mengubah kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi nilai sosial dan budaya masyarakat.

Selain itu, pembangunan desa juga memunculkan perubahan stratifikasi sosial dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap proyek pembangunan dan kekuasaan desa cenderung memperoleh keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding masyarakat lainnya. Akibatnya, muncul kelompok elite baru di masyarakat pedesaan yang memiliki pengaruh lebih besar dalam kehidupan sosial masyarakat.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

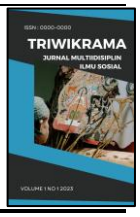


Pembangunan juga menyebabkan meningkatnya mobilitas sosial masyarakat desa. Sebagian masyarakat mulai beralih dari pekerjaan tradisional di sektor pertanian menuju sektor perdagangan, jasa dan usaha ekonomi lainnya. Perubahan tersebut menunjukan bahwa pembangunan mampu mengubah struktur pekerjaan masyarakat pedesaan.

Namun demikian, apabila pembangunan tidak dilakukan secara partisipatif dan adil, maka perubahan sosial yang terjadi dapat memicu konflik sosial dan ketimpangan di masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembanguna fisik, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat.

## F. Peran Negara Dalam Pembangunan dan Relasi Kekuasaan

Negara memiliki posisi penting dalam proses pembangunan karena negara berperan sebagai pembuat kebijakan, pengelola anggaran, serta pengawas pembangunan. Melalui program dana desa, negara berusaha menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Namun, dalam praktiknya peran negara tidak selalu berjalan secara ideal. Pengelolaan pembangunan desa sering kali dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antara pemerintah desa, elite lokal, dan masyarakat. Kelompok yang memiliki jabatan dan kekuasaan lebih besar cenderung memiliki pengaruh dominan dalam menentukan arah pembangunan.

Relasi kekuasaan tersebut menunjukan bahwa pembanguna tidak terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Dalam beberapa kasus, pembangunan desa lebih menguntungkan kelompok elite dibanding masyarakat kecil. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan pembangunan untuk menciptakan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai.

Oleh karena itu, negara perlu meningkatkan transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Pembangunan yang partisipatif dan adil dapat membantu menciptkana kesejahteraan sosial sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat pedesaan.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

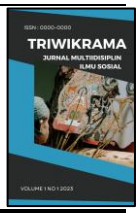


# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Program dana desa memberikan pengaruh besar terhadap perubahan struktur sosial masyarakat pedesaan di Indonesia. Pembangunan desa mampu meningkatkan infrastruktur, aktivitas ekonomi, serta kualitas hidup masyarakat desa. Namun, pembangunan juga memunculkan berbagai perubahan sosial seperti menurunnya budaya gotong royong, meningkatnya kesenjangan sosial, serta munculnya dominasi elite desa dalam pengelolaan pembangunan. Teori modernisasi memandang pembangunan sebagai bentuk kemajuan masyarakat menuju kondisi yang lebih modern dan produktif, sedangkan teori ketergantungan mengkritisi pembangunan yang berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Dengan demikian, pembangunan desa perlu dilakukan secara partisipatif, adil, dan memperhatikan kondisi sosial masyarakat agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara merata.

## B. Saran

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa agar pembangunan dapat berjalan secara adil dan tepat sasaran. Selain itu, partisipasi masyarakat desa perlu diperkuat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan. Pembangunan desa juga sebaiknya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi turut memperhatikan penguatan solidaritas sosial, budaya gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat desa secara berkelanjutan.

**Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial**
Volume 12 No 2, Tahun 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

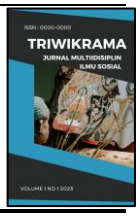


## DAFTAR PUSTAKA

Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193–211.

Cardoso, F. H., & Faletto, E. (1979). Dependency and development in Latin America. University of California Press.

Fitriyani, L., Marita, W., & Windia, W. (2018). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9(3), 526–539.

Frank, A. G. (1967). Capitalism and underdevelopment in Latin America. Monthly Review Press.

Hatu, R. (2011). Perubahan sosial kultural masyarakat pedesaan. Jurnal Inovasi, 8(4), 1–11.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Buku pintar dana desa. Kementerian Keuangan RI.

Rostow, W. W. (1960). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge University Press.

Soekanto, S. (2013). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.

Suharto, E. (2017). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat. Refika Aditama.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). Economic development. Pearson Education.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja, H. A. W. (2014). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh. Rajawali Pers.

Wijaya, A. (2020). Dampak dana desa terhadap pembangunan masyarakat pedesaan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 5(2), 45–56.